

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasa warsa terakhir ini perkembangan *Information and Communication Technology* (Teknologi Informasi dan Komunikasi/TIK) demikian pesatnya, bahkan dalam waktu kurang dari satu tahun dapat terjadi beberapa kali perubahan teknologi yang setiap perubahan tidak jarang terjadi perubahan mendasar yang cukup signifikan. Adanya perubahan yang mendasar di bidang TIK telah menyebabkan perubahan yang mendasar pula pada berbagai aspek, bahkan pada saat ini informasi telah menjadi komoditi yang sangat berharga dan menentukan untuk mencapai keberhasilan (M. Arief, dkk, 2005) dalam Djumadal (2005). Tidak disangkal lagi bahwa TIK dapat digunakan untuk menunjang dalam sistem operasional dan manajerial dari berbagai kegiatan institusi, salah satunya termasuk kegiatan pemerintahan. Seiring dengan hal tersebut, saat ini mulai tumbuh dengan apa yang disebut *electronic Government (e-Government)* sebagai implementasi penggunaan TIK dalam pemerintahan.

Penerapan *e-Government* bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dan mempermudah mendapatkan berbagai informasi sekaligus sebagai media untuk mempublikasikan dan mempromosikan

.....

Dalam aplikasi *e-Government*, para konstituen pemerintah yaitu masyarakat, dunia usaha, pegawai dan pemerintah lainnya dapat berhubungan melalui internet untuk mendapatkan layanan publik. Misalnya, masyarakat dan dunia usaha membutuhkan perijinan ataupun informasi mengenai potensi daerah dapat dengan mudah mendapatkannya melalui internet.

Meskipun *e-Government* memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan publik yang baik, namun, disadari bahwa implementasi bukan suatu hasil pekerjaan yang mudah dicapai dalam waktu singkat. *E-Government* perlu banyak perbaikan. Inovasi pelayanan jasa publik yang dalam penggunaan TIK merupakan suatu proyek jangka panjang yang tidak hanya terbata pada proses administrasi publik, melainkan juga terkait dengan pemberdayaan masyarakat (Davis, 1989).

Salah satu kendala yang sangat nyata dalam implementasi *e-Government* adalah kemampuan untuk beradaptasi sumberdaya manusia (*user*). Masalah sumberdaya manusia adalah tipikal dalam implementasi *e-Government*, terutama di negara berkembang. Pada saat ini masih banyak aparatur pemerintah yang belum memahami terhadap mekanisme kerja bahkan meragukan hasil yang dikeluarkan oleh *e-Government*. Masih banyak aparatur pemerintah yang belum tertarik menggunakan *e-Government* dan sulitnya mengubah budaya kerja untuk memanfaatkan kemajuan dan komunikasi dalam membantu tugas pokok dan fungsi instansi.

Hal tersebut mengakibatkan lambannya pengembangan, penerapan, dan pengelolaan program-program aplikasi instansi pemerintah meskipun program

Oleh karena setiap program aplikasi memerlukan seorang administrator yang mampu mengelola jalannya program aplikasi, sedangkan kenyataan yang ada sangat sedikit aparatur pemerintah yang memahami *e-Government*, maka banyak program aplikasi yang telah dibangun oleh suatu instansi tidak dikelola dengan baik bahkan tidak sedikit program aplikasi yang data/informasinya tidak pernah dimutakhirkan.

Memang betapa canggihnya teknologi, ia tidak dapat berdiri sendiri. Komputer terkait dengan manusia yang mengoperasionalkan dan terkait pula dengan peraturan perundangan yang mengaturnya seperti peraturan perundangan tentang transaksi elektronik. Singkatnya, penerapan komputer (bagian dari *e-Government*) untuk hal yang legal formal memerlukan suatu perubahan sistemik, termasuk pula perubahan perilaku budaya kerja, dan hukumnya.

Model keterkaitan antara TI dengan faktor lain menjadi obyek kajian atau penelitian yang berkembang pesat pada abad milenium ini, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Chau (2001) yang berjudul "*Influence of Computer Attitude and Self-Efficacy on IT Usage Behavior*". Berbagai teori perilaku (*behavioral theory*) banyak digunakan untuk mengkaji proses adopsi TI oleh pengguna akhir (*end users*), di antaranya adalah *Theory of Reason Action*, *Theory of Planned Behaviour*, *Task-Technology Fit Theory*, dan *Technology Acceptance Model*. *Technology Acceptance Model* (TAM) merupakan model penelitian yang paling luas digunakan untuk meneliti adopsi teknologi informasi.

Penelitian ini membahas model teoritis yang menjelaskan dan memprediksi hubungan variabel yang terkait dengan penerimaan dan pemanfaatan teknologi

Dalam TAM, Davis (1986) dalam Ramdhani (2007) menemukan bahwa persepsi terhadap manfaat TI juga mempengaruhi persepsi kemudahan penggunaan TI tetapi tidak berlaku sebaliknya. Dengan demikian, selama individu merasa bahwa TI bermanfaat dalam tugas-tugasnya, ia akan berniat untuk menggunakannya terlepas apakah TI itu mudah atau tidak mudah digunakan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul: **KAJIAN MINAT BERPERILAKU APARATUR PEMERINTAH KOTA DALAM MENGGUNAKAN *E-GOVERNMENT* : APLIKASI *TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL* (TAM).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di bagian awal, maka isu yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sikap berpengaruh dalam persepsi manfaat dan persepsi kemudahan terhadap minat berperilaku aparatur pemerintah dalam menggunakan *e-Government*?
2. Bagaimana efikasi diri berpengaruh dalam persepsi manfaat dan persepsi kemudahan terhadap minat berperilaku aparatur pemerintah dalam

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, secara khusus tujuan penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sikap dalam persepsi manfaat dan persepsi kemudahan terhadap minat berperilaku aparatur pemerintah dalam menggunakan *e-Government*.
2. Untuk mengetahui pengaruh efikasi diri dalam persepsi manfaat dan persepsi kemudahan terhadap minat berperilaku aparatur pemerintah dalam menggunakan *e-Government*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sebagai berikut :

1. Bidang Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai perilaku aparatur pemerintah dalam menggunakan *e-Government*, serta dapat memberikan kontributor pada literatur implementasi *e-Government*.

2. Pemerintah Kota Yogyakarta

Penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam mengelola *e-Government*. Mengetahui faktor-faktor yang berperan dalam pengembangan *e-Government* sehingga dapat memperbaiki kinerja *e*

3. Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman tentang perkembangan penggunaan *e-Government* di Pemkot Yogyakarta yang diukur dengan variabel-variabel sikap, efikasi diri, manfaat, dan minat